Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Hadriani Dahri

hadrianidahri9@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Selain itu ini juga bertujuan untuk mengetahui jenis jenis partisipasi. Memahami tujuan ini akan memberikan keuntungan akademik yang meliputi masukan pengembangan pengetahuan, khususnya pemahaman partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Manfaat lainnya untuk menggali pengetahuan yang luas tentang perencanaan musyawarah pembangunan di desa. Di artikel ini terdapat bahwa partisipasi masyarakat dalam musrembang masih kurang.

Kata Kunci: Partisipasi, Perencanaan pembangunan.

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan adalah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. (Rappang, 2017)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia mengenal dua pendekatan top down dan bottom up untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun kenyataannya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar proposal program yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang dibawahnya. (Rappang, 2017)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan pemerintah tentang desa nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independen

community sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri. (Kebijakan et al., 2016)

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang di berikan merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Program Pembangunan di tingkat kelurahan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah dan makmur oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelurahan. (Nurhastuti, 2019)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan juga berlaku bagi negara-negara yang sedang berkembang, karena ada beberapa faktor, yaitu karena kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian masa datang, untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tak luput dengan mekanisme perencanaan pembangunan dengan adanya SPPN (system perencanaan pembangunan nasional) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Yang mana perencanaan pembangunan bukan hanya dilakukan pada tingkat pusat namun pada tingkat daerah juga. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan kerana pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Mustanir et al., 2020)

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi di pihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan (Mustanir et al., 2020)

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang dapat mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu,

keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.(Sulaeman et al., 2019)

Pembahasan

Konsep Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Nurhastuti, 2019)

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Slamet Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya menurut Adisasmita Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi Program Pembangunan.(Mustanir & Yasin, 2018)

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.(Mustanir et al., 2020)

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menunjuk keterlibatan masyarakat yang akan di perbaiki mutu hidupnya. Menurut Adisasmita dalam .Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan . (Mustanir et al., 2020)

Partisipasi masyarakat pertama adalah Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah dimana partisipasi pemerintah desa dengan masyarakat harus selaras untuk menuju kata sepakat.(Sulaeman et al., 2019)

Partisipasi Masyarakat Menurut Adisasmit menyatakan, “Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan” Menurut Sastropoetro Beberapa bentuk partisipasi meliputi :

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk dana adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi dalam bentuk informasi. Partisipasi pemberian informasi merupakan merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan penghargaan. Pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan- pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.(Ibrahim et al., 2020)

Jenis dan Bentuk Partisipasi

Adisasmit mengemukakan jenis partisipasi terdiri

- a. Partisipasi uang/harta benda yaitu partisipasi dalam memberikan harta benda atau uang.
- b. Partisipasi tenaga yaitu memberikan sumbangsih tenaga fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi keterampilan adalah memberikan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.
- c. c. Partisipasi ide pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan pikiran, pendapat yang konstruktif dalam memperlancar pelaksanaan program dan mengembangkannya.
- d. d. Partisipasi didalam pengambilan kebijakan, dimana masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

Sedangkan Solekhan mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada intinya ada (empat) macam, yaitu :

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa terdapat jenis dan berbagai bentuk dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.(Kepemimpinan et al., 2019)

Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pengertian tentang “partisipasi” yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan- alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara profesional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang- tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing- masing warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek- proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia. (Nurhastuti, 2019)

Konsep Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat, merupakan lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,
- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan,
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”. Dari pengertian di atas bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Anderson, JE., 1990, Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan

(musrenbang) antara lain adalah faktor sosial budaya yang mencakup: norma, nilai kepercayaan, dan sikap. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut. Sehingga prinsip-prinsip partisipasi harus memperhatikan kebersamaan, tumbuh dari bawah (bottom up) dan kepercayaan dan keterbukaan.(Nurhastuti, 2019)

Konsep Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dilihat dari unsur yang membentuknya yaitu perencanaan dan pembangunan. sebuah teori perencanaan yang ideal adalah yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mampu memadukan berbagai kepentingan yang ada. Perencanaan adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, bertujuan mencapai tujuan, alokasi sumber daya, serta kegiatan terus menerus.

Lebih lanjut bahwa perencanaan pembangunan adalah tahap awal proses pembangunan. Sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan adalah acuan/dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Olehnya perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif, serta perlu disusun dalam sebuah perencanaan strategis. Dalam memperoleh hasil maksimal perencanaan pembangunan yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat merupakan salah satu unsur pembangunan itu sendiri. Pelibatan masyarakat juga berarti bahwa pemerintah telah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Sehingga masyarakat dapat merasa memiliki terhadap program-program pembangunan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah tools untuk merencanakan sesuatu di masa mendatang, untuk terjadinya perubahan yang lebih baik dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.

Pembangunan Desa adalah sebuah usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam sebuah negara. pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh sebuah bangsa, negara dan pemerintahan dalam upaya pembinaan bangsa.

Dalam pembangunan peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku actor pembangunan dan pemerintah selaku pengayom dan pengarah sangat dibutuhkan. Antara pemerintah dan masyarakat harus seiring sejalan, saling melengkapi dalam gerak pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus dilakukan mulai tingkat pusat sampai ditingkatan desa. pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.(Kepemimpinan et al., 2019)

Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan itu sendiri. Model ini dilandasi pada nilai-nilai dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Gotong royong berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap warga mempunyai hak dalam memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungannya serta upaya terbaik mewujudkannya. garis-garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penetapan program-program pembangunan
- b. Perencanaan pembangunan berdasar pada masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat.
- c. Perencanaan pembangunan di desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depannya.
- d. Perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan perdamaian. (Kepemimpinan et al., 2019)

Pengertian Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang

Perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya. Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang. (Mustanir & Rusdi, 2019)

Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya Wahab, (2006). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan, yang dimaksud

Perencanaan pembangunan kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.
- 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat sendiri.
- 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.(Nurhastuti, 2019).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah. (Ilmiah et al., 2018)

Penutup

Simpulan

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menunjuk keterlibatan masyarakat yang akan di perbaiki mutu hidupnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Jadi Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, M., Mustanir, A., Adnan, A. A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62. <https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/MV/article/view/118>
- Ilmiah, J., Government, C., Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Ilmu, D., Universitas, P., Rappang, M., Ilmu, D., Publik, A., Muhammadiyah, U., Ilmu, M., Universitas, P., Tonrongnge, D., Baranti, K., Sidenreng, K., Pembangunan, M. P., & Aparatur, P. (2018). *No Title*. 2(1), 67–84.
- Kebijakan, I., Desa, D., Masyarakat, P., & Pembangunan, D. (2016). *Implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa teteaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang*. 04(2).
- Kepemimpinan, A., Optimalisasi, T., Pada, M., & Pembangunan, P. (2019). *Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang*. 1–20. <https://doi.org/10.20956/xxxxxx>
- Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang D. *Journal of Government Science (GovSci)*, 2020(2), 84–108.
- Mustanir, A., & Rusdi, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyiah (APPPTMA)*, 467–475. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). *Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. 8(2), 21–31.
- Nurhastuti. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. 2(2), 145–172.
- Rappang, S. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. 5(2).
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>